



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

JL. JENDERAL AHMAD YANI KAV.58 BYPASS CEMPAKA PUTIH TIMUR  
JAKARTA PUSAT

---

Nomor : 841/DJU/KP.05.2/9/2017 Jakarta, 05 September 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengangkatan kembali Hakim  
Ad Hoc Pengadilan Hubungan  
Industrial untuk masa  
jabatan 2017 - 2022

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru,  
Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Samarinda, Makassar, Ambon,  
Maluku Utara, Jayapura, Mataram dan Kupang  
di-  
Tempat

Berkaitan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 83/P Tahun 2012 tanggal 04 September 2012 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial untuk masa jabatan **PERTAMA** yang akan berakhir pada akhir bulan **Desember 2017**, bersama ini diminta agar Saudara segera mengusulkan Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut untuk masa jabatan yang **KEDUA**, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan kesediaan dari yang bersangkutan untuk diangkat kembali sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
2. Foto copy Surat Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial;

3. Rekomendasi .....

3. Rekomendasi tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Integritas dan Kedisiplinan yang baik ( disertai foto copy data absensi satu tahun terakhir );
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian untuk Saudara perhatikan dan segera tindaklanjuti.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**HERRI SWANTORO**

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Negeri **Yogyakarta, Gresik, Medan, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Samarinda, Makassar, Mamuju, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mataram dan Kupang.**